

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI SELATAN**

**ROSMILA**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI SELATAN**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**ROSMILA**

**A011201050**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**

# SKRIPSI

## ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh :

ROSMILA  
A011201050

telah dipertahankan dalam ujian skripsi

Makassar, 20 Februari 2024

Pembimbing I



Dr. Fatmawati, M.Si., CWM  
NIP. 19640106 198803 2 001

Pembimbing II



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM  
NIP. 19770913 200212 2 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI

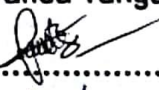



## ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh :

ROSMILA  
A011201050


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal, 20 Februari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fatmawati, M.Si., CWM	Ketua	1..... 
2.	Dr. Retno Fitrianti, SE., M. Si., CWM	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA	Anggota	3..... 
4.	Randi Kumiawan, SE., M.Sc	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM  
NIP. 19740715 200212 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **ROSMILA**  
Nomor Pokok : **A011201050**  
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis UNHAS**  
Jenjang : **Sarjana (S1)**

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul *Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Sulawesi Selatan* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,

Yang Menyatakan



**Rosmila**

**A011201050**

## PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan tugas akhir berjudul "**Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Sulawesi Selatan**" sebagai syarat meraih gelar sarjana ekonomi. Proses penyelesaian tugas akhir ini merupakan suatu perjuangan dan tantangan yang melelahkan, namun juga memberikan kepuasan. Penulis berhasil mengatasi berbagai hambatan dan masalah yang muncul dalam perjalanan penyelesaian tugas ini. Namun, penyelesaian tugas akhir dan perolehan gelar sarjana ekonomi hanyalah sebuah pencapaian kecil dalam perjalanan hidup yang panjang yang akan penulis hadapi di masa depan. Sebelum memasuki tahap selanjutnya yang pastinya akan lebih sulit, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan penting dalam hidup penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Kamaruddin dan ibu Rosmini yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas seluruh bantuan yang telah diberikan, yakni kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, beserta jajarannya
2. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd Rahman Kadir, S.E., M.Si CIPM beserta jajarannya
3. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Sabir SE., M.Si., CWM® dan Sekretaris Departemen Ibu Dr. Fitriwati, SE.,M.Si. Terima Kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi

4. Kepada bapak Randi Kurniawan, SE., M.Sc selaku dosen penasihat akademik penulis. Terima kasih karena telah bersedia menjadi mentor sekaligus penguji serta menyediakan data bagi penulis. Terima kasih pula karena telah mengajak penulis dalam berbagai kegiatan yang selalu menambah ilmu penulis selama masa kuliah.
5. Kepada Dr. Fatmawati, M.Si., CWM dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M. Si., CWM selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan kritik, serta saran yang membangun dalam tugas akhir penulis.
6. Kepada Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA selaku dosen penguji penulis atas kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam penelitian ini.
7. Kepada seluruh dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhususnya Dosen Ilmu Ekonomi yang menginspirasi dan dengan rendah hati mengajarkan terkait pemikiran-pemikiran ekonomi. Terima kasih penulis ucapkan atas segala ilmu yang diberikan.
8. Kepada Staf dan Petugas di Departemen Ilmu Ekonomi, Pak Ashkar beserta jajarannya yang selalu menyambut penulis dengan baik setiap kali menyambangi departemen.
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis di Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2020 terkhususnya, Sabrina, Eva, Muthia, Ashernov, Rizka, Nur Aprilia, Nasriah, Wanda, Zahra, Alfiah, Dhea, Fira, dan Shadiq. serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah kebersamai penulis selama masa-masa kuliah penulis, terima kasih karena telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini.
10. Teruntuk Muh. Fachrul yang selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini.

11. Teruntuk teman-teman KKN Penulis yakni Isti, Sherly, Kak Yuli, Kak Bray, Kak Khaerul, Reza, Kak Muf, dan Kak Sidiq. Terima kasih karena telah menemani penulis membuka lembaran baru dalam hidup dan memberikan pengalaman yang tak akan pernah dilupakan.
12. Teruntuk Sobat Sibiksu yakni, Perti, Karisma, Ayu A, Fifi, dan Ayu yunesti. Terima kasih karena telah bersama-sama dengan penulis sejak maba.
13. Teruntuk teman dekat penulis yakni Nurfadilla yang selalu ada ketika saat suka maupun duka. Terima kasih karena selalu ada di masa-masa berat penulis menjalani hidup.

Makassar, 15 Februari 2024

Rosmila



## ABSTRAK

### **Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Sulawesi Selatan**

Rosmila  
Fatmawati  
Retno Fitrianti

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki masalah kesejahteraan yang perlu diperhatikan. Adanya masalah kesejahteraan di Sulawesi Selatan tercermin dari angka kemiskinan. Menurut data BPS pada maret 2022 jumlah penduduk yang berada diatas garis kemiskinan miskin mencapai 777,44 ribu orang atau sekitar 8,63 persen. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data cross-section dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022. Sampel yang digunakan sebanyak 9.244 rumah tangga yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dan analisis dilakukan dengan regresi linier Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan kesejahteraan antara perempuan yang menikah dini dan yang menikah diusia dewasa. Perempuan yang menikah dini mempunyai tingkat kesejahteraan rumah tangga yang lebih rendah daripada perempuan yang menikah diusia dewasa. Hasil penelitian juga menemukan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia kurang dari 25 tahun, memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia lebih dari 25 tahun. Selanjutnya, terdapat perbedaan kesejahteraan rumah tangga berdasarkan status pendidikan perempuan, status pekerjaan dan wilayah /tempat tinggal. Perempuan yang berpendidikan dan bekerja mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak berpendidikan dan tidak bekerja. Terakhir, wilayah/tempat tinggal perdesaan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan Rumah Tangga, Pernikahan Dini, Sulawesi Selatan, Susenas

## **ABSTRACT**

### ***An Analysis of the Impact of Early Marriage on Household Welfare in South Sulawesi***

Rosmila  
Fatmawati  
Retno Fitrianti

*South Sulawesi is one of the provinces in Indonesia that has welfare problems that need attention. The existence of welfare problems in South Sulawesi is reflected in the poverty rate. According to BPS data in March 2022 the number of people above the poor poverty line reached 777.44 thousand people or around 8.63 percent. This study aims to analyze the impact of early marriage on household welfare in South Sulawesi. This study uses cross-section data from the 2022 National Socio-Economic Survey (SUSENAS). The sample used was 9,244 households selected through purposive sampling technique, and the analysis was conducted with Ordinary Least Squares (OLS) linear regression. The results found that there is a difference in welfare between women who married early and those who married later in life. Women who marry early have a lower level of household welfare than women who marry later in life. The results also found that women who gave birth at the age of less than 25 years had a lower level of welfare than women who gave birth at the age of more than 25 years. Furthermore, there are differences in household welfare based on women's educational status, employment status and region/place of residence. Women who are educated and working have a higher level of welfare than those who are not educated and not working. Finally, rural areas/places of residence show lower levels of welfare than urban areas.*

**Keywords:** *Household Welfare, Child Marriage, South Sulawesi, Susenas*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1 Tinjauan Teoritis.....	15
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	30
2.3 Tinjauan Empiris.....	35
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	41
2.5 Hipotesis Penelitian .....	42
BAB III METODE PENELITIAN .....	43
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian .....	43
3.3 Populasi dan Sampel.....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.5 Model Analisis Data.....	44
3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	51
4.2 Deskripsi Data .....	51

4.3 Hasil Estimasi.....	64
4.4 Interpretasi Model.....	71
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN .....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga diatas garis kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 .....	52
4.2	Ringkasan Statistik Variabel Penelitian .....	63
4.3	Hasil Regresi Linear Berganda (OLS) .....	64
4.4	Hasil Uji Normalitas.....	66
4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	67
4.6	Hasil Regresi Robust .....	69
4.7	Hasil Uji Multikolinearitas .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Perempuan yang Menikah Dini di Sulawesi Selatan Berdasarkan Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga Tahun 2022 .....	2
1.2 Persentase Perempuan yang Pernah Menikah Sebelum Usia 19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	4
1.3 Persentase Perempuan yang melahirkan sebelum Usia 19 Tahun dan telah Menikah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	6
1.4 Persentase Perempuan yang telah Menikah di Bawah umur 19 Tahun Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	8
1.5 Persentase Perempuan yang telah Menikah di Bawah umur 19 Tahun Berdasarkan Status pekerjaan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	10
1.6 Persentase Perempuan yang telah Menikah di Bawah umur 19 Tahun Berdasarkan Wilayah /Tempat Tinggal di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	11
2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	41
4.1 Status Pernikahan Perempuan Tahun 2022 .....	55
4.2 Status Melahirkan Perempuan Tahun 2022 .....	56
4.3 Status Pendidikan Perempuan Tahun 2022 .....	58
4.4 Status pekerjaan Tahun 2022 .....	59
4.5 Jumlah Perempuan yang Menikah menurut Wilayah/Tempat Tinggal Tahun 2022.....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Data Set.....</b>	<b>90</b>
1. Kuisisioner Survei Sosia Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2022	90
2. Data Susenas sebelum diolah.....	91
3. Data Susenas siap diolah .....	92
<b>Lampiran 2. Hasil Estimasi.....</b>	<b>93</b>
1. Ringkasan Statistik Variabel Penelitian .....	93
2. Hasil Regresi Linear Berganda, Metode Ordinary Least Square (OLS).....	93
3. Uji Normalitas .....	94
4. Uji Heteroskedastisitas.....	94
5. Regresi Robust.....	94
4. Uji Mutikolinearitas.....	95
<b>Lampiran 3. Biodata Penulis.....</b>	<b>96</b>

# **BAB I**

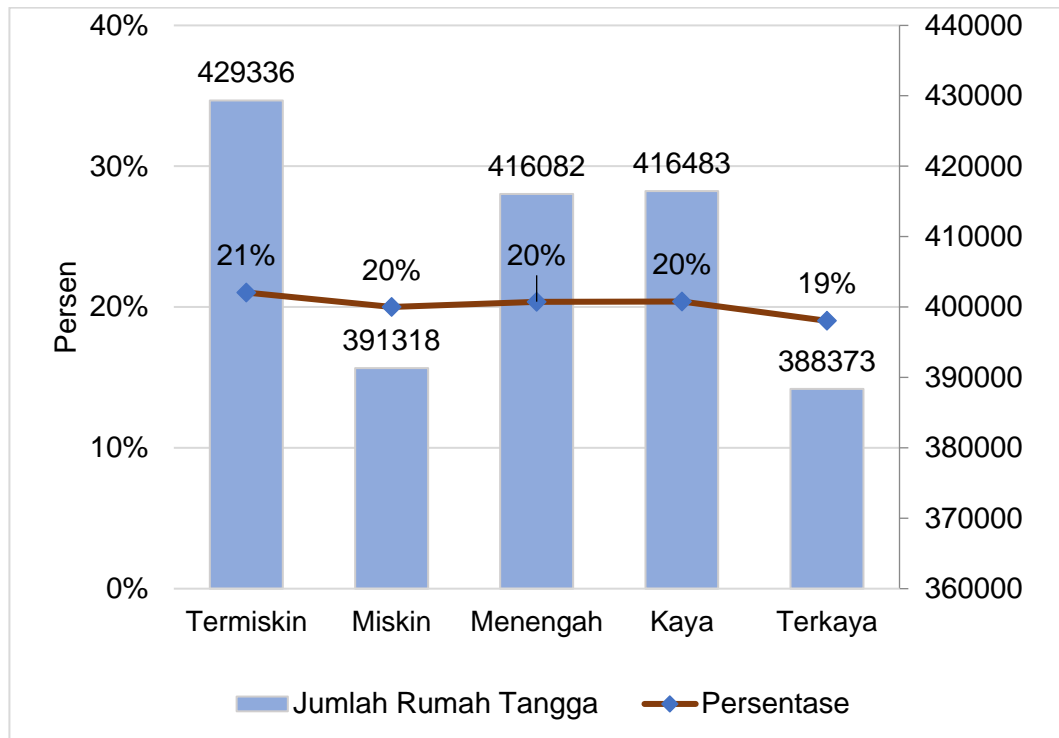
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki masalah kesejahteraan yang perlu diperhatikan. Adanya masalah kesejahteraan di Sulawesi Selatan tercermin dari angka kemiskinan. Menurut data BPS pada Maret 2022 jumlah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan miskin mencapai 777,44 ribu orang atau sekitar 8,63 persen, mengalami peningkatan sebanyak 12 ribu orang atau sekitar 0,10 persen poin dari bulan September 2021 dan menurun 7,54 ribu orang atau sekitar 0,15 persen poin terhadap Maret 2021. Meskipun terjadi penurunan, angka kemiskinan tersebut masih cukup tinggi yang menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang kurang sejahtera di daerah ini.

Pengeluaran perkapita rumah tangga adalah salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga (Rambe, dkk., 2008). Indikator ini menghitung biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Rata-rata pengeluaran perkapita rumah tangga di Sulawesi Selatan dalam sebulan sebesar Rp. 1.142.612. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu Rp. 1.327.782 (BPS, 2022). Selain itu, Berdasarkan data Susenas tahun 2022 menunjukkan bahwa penggolongan pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga di Sulawesi Selatan yang masih berada pada kategori miskin.





Sumber: Data Susenas, 2022 (diolah)

**Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Perempuan yang Menikah Dini di Sulawesi Selatan Berdasarkan Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga Tahun 2022**

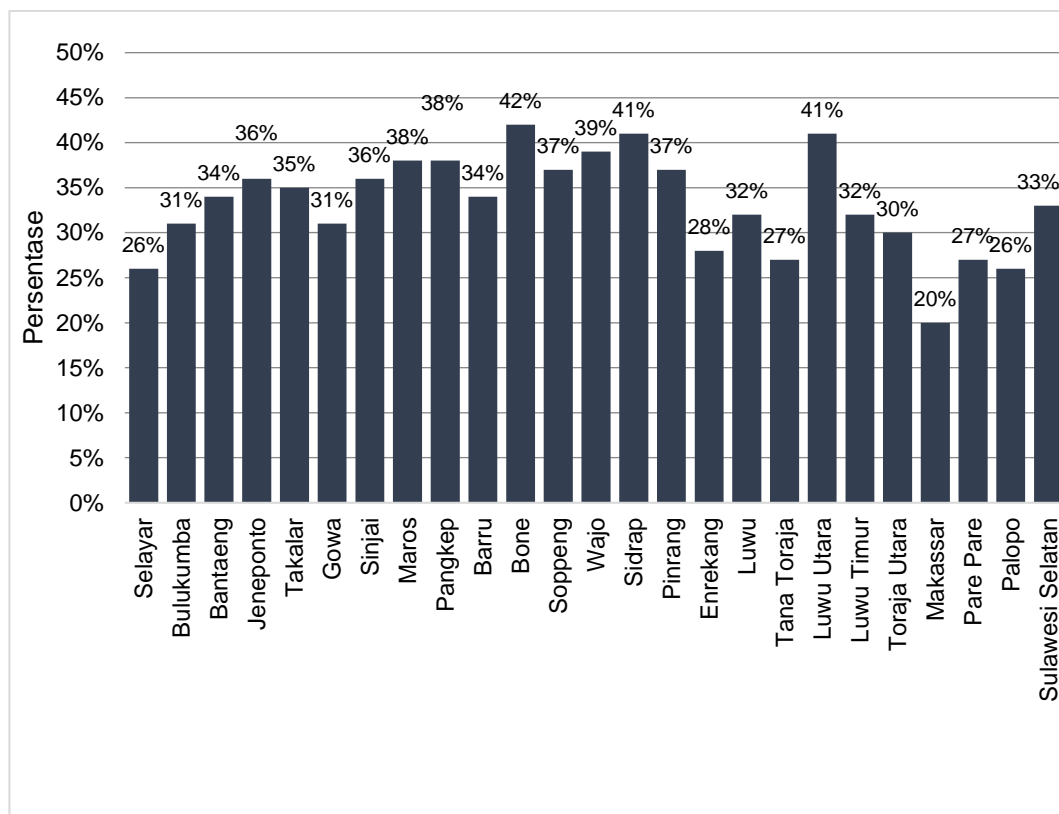
Data diatas menunjukkan bahwa 820.654 rumah tangga perempuan yang menikah dini atau sekitar 41 persen rumah tangga di Sulawesi Selatan berada dalam kategori miskin dan termiskin berdasarkan quantil kekayaan dari pengeluaran perkapita rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, di mana sebagian besar penduduk harus menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, perhatian yang lebih mendalam perlu juga diberikan terhadap 20 persen rumah tangga yang tergolong dalam kategori menengah, yang mungkin berada dalam kondisi rentan dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan rumah tangga miskin, namun populasi ini dapat menjadi rentan terhadap perubahan ekonomi yang tidak terduga. Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan

seharusnya tidak hanya ditujukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, tetapi juga merinci solusi yang dapat meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan di lapisan masyarakat menengah. Pentingnya menanggapi ketidaksetaraan ini juga tercermin dari fakta bahwa sekitar 39 persen rumah tangga tergolong dalam kategori kaya dan terkaya. Oleh karena itu, Sulawesi Selatan perlu menerapkan upaya yang lebih serius dan terarah untuk memperbaiki kesejahteraan, sehingga masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga adalah dini yang menikah di usia dini (Sagalova, *et al.*, 2021). Perkawinan usia dini adalah praktik perkawinan pada usia di bawah 19 tahun yang belum siap secara fisik atau emosional untuk menghadapi pernikahan (Vidalia & Asniar, 2022). Selain itu, pernikahan dini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga (Hasbi, 2019). Penelitian telah membuktikan bahwa dampak dari pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya kesiapan emosional dini perempuan dalam menghadapi kesulitan hidup berumah tangga, namun juga berkaitan dengan terhambatnya peluang karir mereka dan terbatasnya kemampuan mereka untuk mengembangkan potensi sosial ekonomi mereka di masa depan (Durğut & Kisa, 2018; Meidiana & Marhaeni, 2019).

Meskipun pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menghindari perkawinan dini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan mengubah ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan. Yakni, batas usia minimum perkawinan untuk perempuan dan laki-laki telah dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun, sampai saat ini pernikahan dini masih banyak terjadi di wilayah Indonesia (Bawono dkk., 2022).

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi dengan persentase perkawinan dini yang melebihi rata-rata nasional dan memiliki proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum mencapai usia 18 tahun sebesar 9.33 persen (Putri, 2022; BPS, 2022). Adapun, persentase pernikahan dini perempuan di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.



Sumber: Data Susenas, 2022 (diolah)

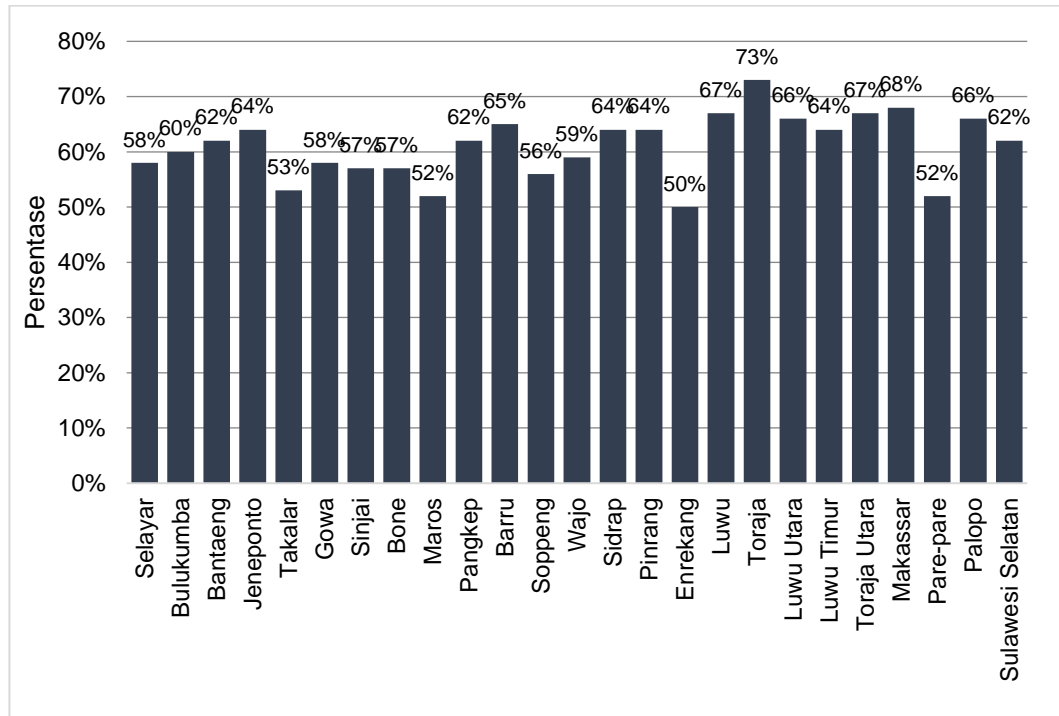
**Gambar 1.2 Persentase Perempuan yang Menikah Sebelum Usia 19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat pernikahan dini di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan cukup tinggi yakni rata-rata berada diatas 20 persen. Tiga daerah yang memiliki persentase tertinggi yaitu kabupaten Bone dengan persentase sebesar 42 persen, Kabupaten Luwu Utara sebesar 41 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan persentase sebesar 41

persen. Hal ini, menunjukkan bahwa pada ketiga wilayah tersebut hampir setengah dari dini perempuan melakukan pernikahan pertamanya diusia kurang dari 19 tahun.

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain norma sosial dan budaya yang mendorong pernikahan dini di usia yang masih sangat muda (Bawono, dkk., 2022). Praktik mahar, keuangan rumah tangga, dan kerangka hukum merupakan faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini di Sulawesi Selatan (Ratnaningsih dkk., 2022) Sikap masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang tegas terhadap adat perkawinan juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di daerah ini (Muliadi, 2016). Serta, rendahnya pengetahuan tentang bahaya dari pernikahan dini di beberapa daerah juga dapat menyebabkan tingginya pernikahan dini (Susanti & Mayang sari, 2019).

Dampak dari tingginya persentase pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi perempuan (Buton & Idris, 2021). Dari segi fisik, perempuan yang menikah dini dan melahirkan pada usia di bawah 19 tahun mempunyai resiko yang besar karena pada usia tersebut, organ reproduksinya belum memiliki kekuatan yang cukup untuk proses persalinan (Buton dkk., 2021). Berdasarkan data Susenas tahun 2022, menunjukkan bahwa sebanyak 2.129 perempuan di Sulawesi Selatan telah menikah dan melahirkan dini pertama mereka sebelum mencapai usia 19 tahun. Adapun, persentase perempuan menikah dan melahirkan dini pertamanya di bawah usia 19 tahun dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut.



Sumber: Data Susenas, 2022 (diolah)

**Gambar 1.3 Persentase Perempuan yang melahirkan sebelum Usia 19 Tahun dan telah Menikah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022**

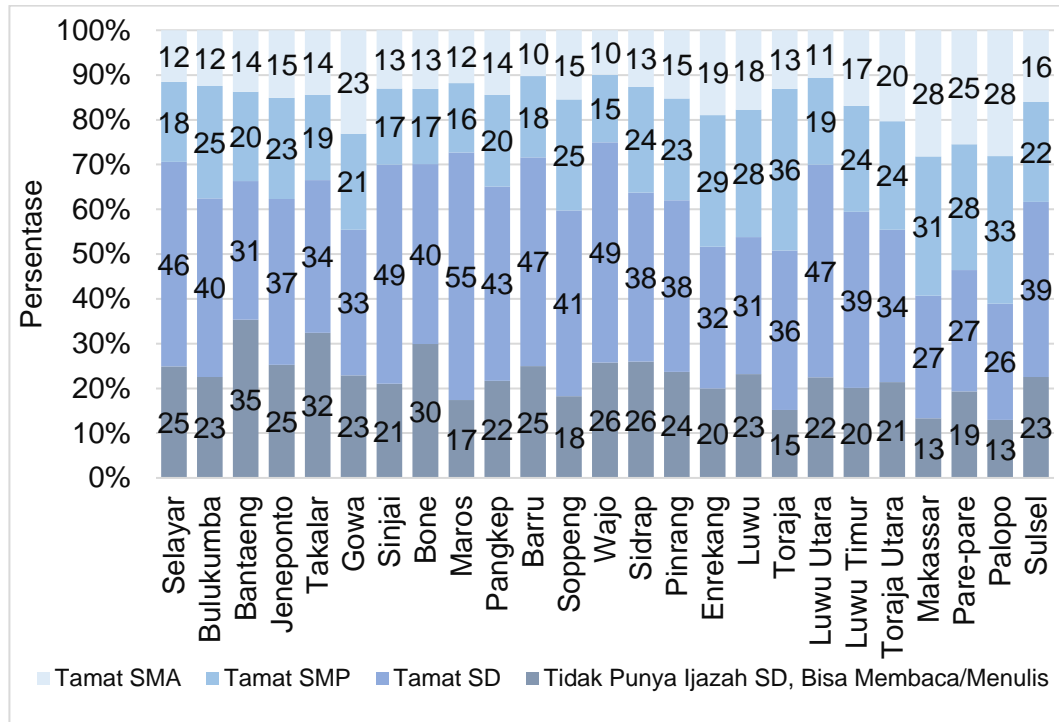
Data pada gambar 1.3 juga menunjukkan bahwa persentase perempuan yang telah menikah dan melahirkan pada usia di bawah 19 tahun bervariasi di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan rata-rata berada di atas 50 persen. Terdapat tiga daerah dengan persentase status melahirkan kurang dari 19 tahun tertinggi yaitu Toraja dengan persentase sebesar 73 persen, Makassar 68 persen, serta Luwu dan Toraja Utara dengan persentase masing-masing 67 persen. Artinya, pada daerah tersebut lebih dari 50 persen perempuan yang telah menikah di usia dini dan telah melahirkan dini peramanya di bawah umur 19 tahun.

Faktor yang menyebabkan tingginya angka melahirkan pertama di usia dini yaitu kurang memadainya pengetahuan perempuan tentang tingginya resiko hamil di usia dini (Talukder *et al.*, 2021) Adapun, dampak dari hamil dan melahirkan pada usia yang terlalu muda ini juga dapat memberikan dampak yang serius

terhadap sosial dan ekonomi individu, keluarga dan masyarakat (Fletcher & Padrón, 2016; WHO, 2023). melahirkan dini pada usia dini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengembangan soft skill dan kepribadian, yang dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi dalam jangka Panjang (Fletcher & Padrón, 2016)

Selain status pernikahan dan status melahirkan, pendidikan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Pendidikan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan, karena tingkat pendidikan yang dicapai seseorang dapat menentukan peluang seseorang dalam mendapatkan pekerjaan dengan imbalan yang tinggi sehingga dapat berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga (Ozturk, 2001). Demikian pula, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kesejahteraan rumah tangganya karena akan mendapatkan manfaat timbal balik seperti pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang mencukupi (OECD, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa rata-rata lama sekolah perempuan di Sulawesi Selatan hanya 8,48 tahun, artinya kebanyakan lama sekolah perempuan di Sulawesi Selatan hanya sampai pada kelas 2 pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adapun, data persentase perempuan yang telah menikah di bawah usia 19 tahun berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut.



Sumber: Data Susenas, 2022 (diolah)

**Gambar 1.4 Persentase Perempuan yang telah Menikah di Bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Pendidikan Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa secara total, persentase tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun paling banyak pada tingkat SD dengan rata-rata persentasenya di seluruh kabuapten/kota sebesar 38 persen. Adapun, persentase tertinggi berada di kabupaten Wajo dan Kabupaten Sinjai yakni masing-masing sebesar 49 persen. Artinya, dari 100 orang perempuan yang menikah dini, ada 49 orang yang memiliki ijazah setingkat SD. Adapun perempuan yang menikah dini dan tidak memiliki ijazah SD namun bisa membaca dan menulis mempunyai persentase rata-rata sebesar 23% di seluruh kabuapten/kota di Sulsel. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang menikah dini dan tidak tamat SD. Adapun, daerah dengan persentase tertinggi untuk kategori ini yaitu Kabupaten Bantaeng dengan persentase sebesar 35 persen. Artinya, dari 100 orang perempuan yang menikah

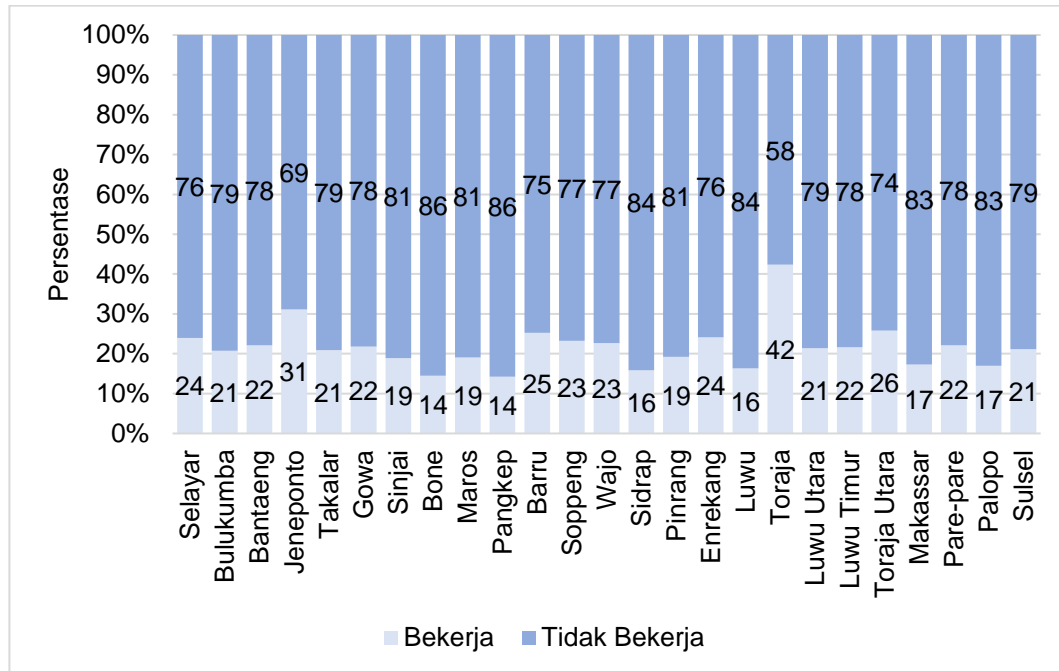
dini, masih ada 35 orang yang belum mempunyai ijazah SD meskipun mereka bisa membaca dan menulis.

Di sisi lain, perempuan yang menikah dini dan memiliki ijazah SMP juga mempunyai persentase rata-rata sebesar 23 persen di seluruh kabupaten/kota Sulawesi Selatan, dengan persentase paling banyak di Toraja dengan persentase sebesar 36 persen. terakhir yaitu yang memiliki ijazah SMA, ini mempunyai persentase terendah secara keseluruhan yakni rata-ratanya hanya sekitar 16 persen.

Faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan dalam banyak kasus yaitu, karena keluarga tidak mampu menyekolahkan dini perempuan mereka dan juga dapat dipengaruhi oleh norma budaya, dini perempuan diharapkan menikah di usia muda dan memprioritaskan peran mereka sebagai istri dan ibu dibandingkan pendidikan (Hermambang dkk., 2021).

Adapun, dampak dari pendidikan yang rendah ini kemudian dapat membatasi peluang kerja mereka di masa depan (Raj *et al.*, 2019). Sehingga menyebabkan mereka mempunyai akses yang terbatas pada pekerjaan yang memberikan keamanan kerja, upah yang layak, dan perlindungan sosial yang memadai (UNICEF, 2018). Sebagai akibatnya, perempuan yang menikah muda sering kali tidak bekerja atau hanya bekerja di sektor informal yang tidak menawarkan keamanan kerja dan upah yang memadai (Wodon *et al.*, 2017). Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan perempuan yang menikah muda, karena mereka tidak memiliki jaminan keamanan finansial dan perlindungan sosial yang memadai (Wodon *et al.*, 2017). Di Sulawesi Selatan sendiri, dominan perempuan yang menikah dini bekerja tidak bekerja. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut.





Sumber: Data Susenas, 2022 (diolah)

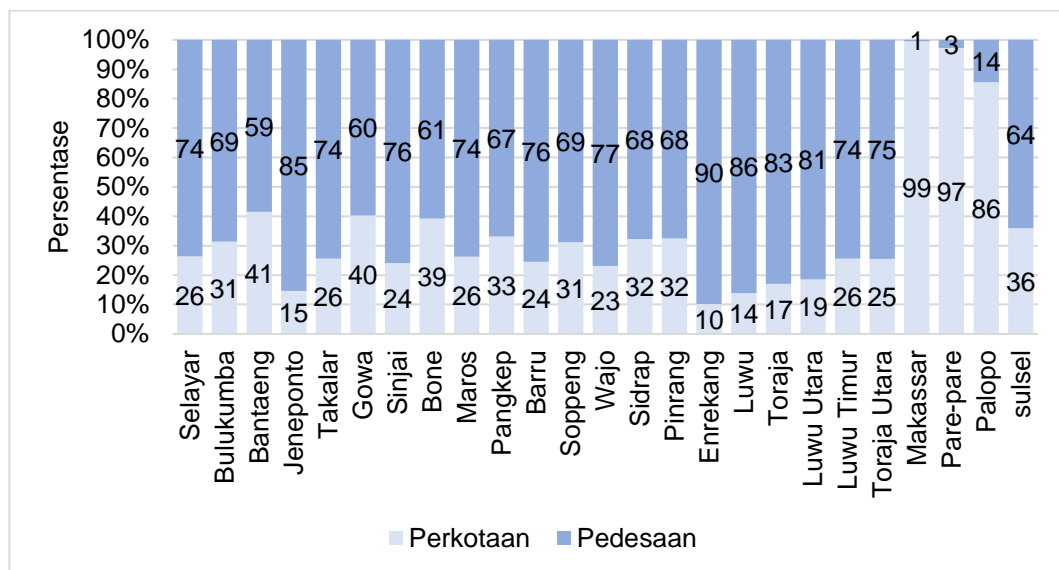
**Gambar 1.5 Persentase Perempuan yang telah Menikah di Bawah umur 19 Tahun Berdasarkan Status pekerjaan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan bahwa persentase perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih banyak tidak bekerja dibandingkan yang bekerja. Daerah dengan persentase tertinggi untuk yang bekerja adalah Toraja dengan persentase sebesar 42 persen. Artinya, dari 100 perempuan yang menikah dini terdapat 42 orang yang bekerja. Adapun, daerah dengan persentase terendah yaitu kabupaten Bone dan Pangkep dengan persentase masing-masing 14 persen. Artinya dari 100 perempuan yang menikah dini hanya terdapat 14 orang yang bekerja.

Faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan partisipasi perempuan bekerja dan tidak bekerja diantaranya yaitu, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, serta norma budaya dan sosial yang lebih

mengutamakan peran perempuan di rumah dibandingkan partisipasinya dalam dunia kerja (Gobena & Berelie, 2022).

Di sisi lain, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini cenderung terjadi di perdesaan, dan juga dapat berdampak pada partisipasi perempuan untuk bekerja di sektor informal (Purwaningsih, 2021). Hal ini dapat terjadi karena pernikahan dini cenderung terjadi di perdesaan yang kemudian memaksa perempuan untuk bekerja di sektor informal terutama pada sektor primer sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga mereka (Purwaningsih, 2021). Adapun data yang menunjukkan bahwa pernikahan dini cenderung terjadi di perdesaan dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut.



Sumber: Data Susenas, 2022 (diolah)

**Gambar 1.6 Persentase Perempuan yang telah Menikah di Bawah umur 19 Tahun Berdasarkan Wilayah/Tempat Tinggal di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022**

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan dalam hal praktik pernikahan usia muda. Di daerah perdesaan, dominan terjadi di daerah yang masuk kategori kabupaten. Kabupaten Enrekang mempunyai persentase

pernikahan dini tertinggi di daerah perdesaan yakni mencapai 90 persen. Di sisi lain, untuk daerah perkotaan umumnya memang terjadi pada wilayah yang masuk kategori kota seperti Makassar, Pare-pare, dan Palopo. Adanya perbedaan antara wilayah tempat tinggal ini juga dapat menyebabkan adanya perbedaan kesejahteraan di perdesaan dan perkotaan (Hermambang dkk, 2021).

Dalam menghadapi masalah kesejahteraan rumah tangga, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satu contohnya adalah pemberdayaan perempuan rentan dan pembentukan jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak ekonomi yang terjadi (Istriyani dkk., 2022). Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, dan hal ini memerlukan keterlibatan masyarakat serta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menemukan solusi inovatif dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran tersebut, penting dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai **"Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Sulawesi Selatan"** guna memahami secara lebih komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga di wilayah tersebut. Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik dalam mengembangkan kebijakan dan program intervensi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di Sulawesi Selatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah yang dapat diambil untuk penulisan proposal skripsi ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan kesejahteraan rumah tangga berdasarkan status pernikahan di Sulawesi Selatan?

2. Apakah ada perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status melahirkan di Sulawesi Selatan?
3. Apakah ada perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status pendidikan perempuan di Sulawesi Selatan?
4. Apakah ada perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status pekerjaan perempuan di Sulawesi Selatan?
5. Apakah ada perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan wilayah/tempat tinggal di Sulawesi Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status pernikahan di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status melahirkan di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status pendidikan perempuan di Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status pekerjaan di Sulawesi Selatan.
5. Untuk mengetahui perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan wilayah/tempat tinggal di Sulawesi Selatan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Terdapat 3 kegunaan dalam penelitian ini, yakni secara teoritis, praktis, dan kebijakan.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pernikahan dini dan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan dalam bidang tersebut dan memberikan wawasan baru terkait faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan rumah tangga di Sulawesi Selatan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Untuk peneliti, mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, wawasan, serta informasi terkait masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berharga kepada pihak-pihak terkait dalam merancang dan mengimplementasikan program dan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi Masyarakat.

##### **3. Kegunaan Kebijakan**

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah sosial ekonomi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Kesejahteraan**

Kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau kelompok individu, baik laki-laki maupun perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup yang bermartabat (Bapennas, 2022). Definisi ini menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak dasar individu untuk hidup yang layak. Kemudian, menurut (UNDP, 2023) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah upaya untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Adapun, teori kesejahteraan dalam konsep mikro ekonomi adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan memaksimalkan kesejahteraan individu (Aronsson & Löfgren, 2007). Kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan utilitas, yaitu tingkat kepuasan atau kebahagiaan yang dirasakan oleh individu (Aronsson & Löfgren, 2007). Tujuan utama dari teori kesejahteraan adalah untuk memaksimalkan utilitas individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konsep mikro ekonomi, teori kesejahteraan digunakan untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi yang diambil oleh individu dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri dan orang lain di sekitarnya (Aronsson & Löfgren, 2007). Misalnya, keputusan untuk membeli produk tertentu

dapat mempengaruhi kesejahteraan konsumen dan produsen, serta orang-orang yang terkait dengan produksi dan distribusi produk tersebut.

Salah satu teorema dalam teori kesejahteraan dalam konsep mikroekonomi adalah Teorema Dasar Kesejahteraan (Teorema Dasar Pertama Ekonomi Kesejahteraan). Teorema ini menyatakan bahwa pasar yang kompetitif cenderung menuju keseimbangan yang efisien dalam alokasi sumber daya. Dalam keseimbangan ini, tidak mungkin membuat satu pihak menjadi *better off* tanpa membuat pihak lain menjadi *worse off*. Teorema ini memberikan justifikasi teoritis untuk efektivitas pasar dalam alokasi sumber daya. Dalam konsep mikroekonomi, efisiensi pasar diukur dengan kriteria Pareto optimal. Pareto optimal adalah kondisi di mana tidak ada alokasi sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Dalam pasar yang efisien, alokasi sumber daya akan mencapai optimalitas Pareto. Namun, teori kesejahteraan dalam konsep mikroekonomi juga mengakui bahwa pasar tidak selalu menghasilkan alokasi sumber daya yang adil. Oleh karena itu, teori ini juga mempertimbangkan masalah pembagian yang adil dalam alokasi sumber daya. Masalah Pembagian yang adil ini melibatkan bagaimana suatu set barang dapat dibagi secara adil di antara beberapa pihak. Terdapat berbagai jenis masalah Pembagian yang adil, yang bergantung pada faktor-faktor seperti preferensi peserta, jenis barang yang dibagikan, dan kriteria keadilan yang diinginkan (Aronsson & Löfgren, 2007).

Kontribusi penting lainnya dalam teori kesejahteraan datang dari Leon Walras, Vilfredo Pareto, dan Arthur Cecil Pigou. Walras mengembangkan sistem keseimbangan umum yang didasarkan pada prinsip-prinsip utilitas maksimal dan profit maksimal (Aronsson & Löfgren, 2007). Pareto memperkenalkan kriteria

Pareto, yang menyatakan bahwa kesejahteraan meningkat jika ada orang yang mendapatkan manfaat tanpa ada yang merugi. Pigou membahas peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengenaan pajak lingkungan untuk mengatasi eksternalitas. Teori kesejahteraan juga membahas topik seperti eksternalitas, barang publik, desain mekanisme, dan pengukuran kesejahteraan dalam ekonomi dinamis. Pengukuran kesejahteraan dalam ekonomi dinamis melibatkan analisis tentang bagaimana mengukur perubahan kesejahteraan dari waktu ke waktu dalam konteks ekonomi yang berubah. Dalam teori kesejahteraan, pengukuran kesejahteraan digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan publik dan perubahan struktural dalam perekonomian. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kesejahteraan dapat dikaji berdasarkan delapan bidang yang meliputi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Lebih lanjut, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dalam konsep mikro. Berikut beberapa di antaranya:

- 1) Pengeluaran Perkapita Rumah Tangga

Pengeluaran per kapita rumah tangga menjadi indikator kunci dalam mengukur kesejahteraan suatu masyarakat. Hal ini terkait erat dengan daya beli individu atau keluarga, mencerminkan sejauh mana mereka dapat membeli barang dan jasa. Tingkat pengeluaran per kapita bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan perawatan



kesehatan. Dalam konteks ini, pengeluaran per kapita menjadi indikator yang sangat relevan untuk memahami tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Peningkatan pengeluaran per kapita sering diartikan sebagai pertanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan standar hidup. Ini menciptakan kondisi di mana masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Konsep kesejahteraan ekonomi tidak hanya terfokus pada aspek individu, tetapi juga mencakup pandangan lebih luas tentang bagaimana kesejahteraan didistribusikan di seluruh masyarakat.

Pengeluaran per kapita juga dapat memberikan wawasan tentang ketidaksetaraan ekonomi. Jika distribusi pengeluaran relatif merata, ini bisa dianggap sebagai tanda kesejahteraan yang lebih merata di dalam suatu masyarakat. Namun, jika terdapat disparitas yang signifikan antara kelompok, hal ini dapat mengindikasikan adanya tantangan struktural yang perlu diatasi.

## 2) Pendapatan

Menurut Samuelson & Nordhaus (2010) pendapatan adalah jumlah penerimaan atau uang tunai yang diperoleh seseorang ataupun rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari pendapatan tenaga kerja, pendapatan properti, dan pembayaran transfer pemerintah (Samuelson & Nordhaus, 2010). Adapun, menurut Badan Pusat Statistik (2022) mendefinisikan pendapatan sebagai total penghasilan yang diterima dari berbagai sumber, termasuk sektor formal dan nonformal, yang diakumulasikan dalam suatu jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah hasil dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu yang menerima aliran dana dari berbagai sumber. Pendapatan

individu dapat mencerminkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan (Mulia & Saputra, 2020). Selain itu, pendapatan juga dapat mempengaruhi akses seseorang terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya (Mulia & Saputra, 2020).

### 3) Kepemilikan Aset

Dalam mengukur kesejahteraan seseorang, rumah tangga, ataupun suatu bangsa, tolak ukur yang paling sering digunakan adalah kekayaan dalam hal ini aset yang dimiliki (Samuelson & Nordhaus, 2010). Kekayaan sebuah rumah tangga termasuk barang-barang berwujud yang dimilikinya, seperti, rumah, mobil, dan lainnya (Samuelson & Nordhaus, 2010). Kepemilikan aset mencerminkan akumulasi kekayaan individu atau kelompok, yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan jangka Panjang (Aronsson & Löfgren, 2007). Dalam konteks ini, aset menjadi faktor penting yang mencerminkan sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki aset cenderung lebih sejahtera dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki aset (Meidiana & Marhaeni, 2019). Kepemilikan aset memberikan rumah tangga stabilitas finansial dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik dan dapat menjadi faktor internal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga (Meidiana & Marhaeni, 2019).

Rumah tangga dengan kekayaan yang lebih tinggi memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang lebih baik (Meidiana & Marhaeni, 2019). Kekayaan memainkan peran penting dalam membuka pintu kesempatan bagi rumah tangga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan mobilitas sosial. Selain itu, kekayaan juga mempengaruhi pola

konsumsi dan gaya hidup rumah tangga. Rumah tangga dengan kekayaan yang lebih besar cenderung memiliki akses terhadap barang dan jasa yang lebih luas, meningkatkan standar hidup mereka secara keseluruhan.

#### 4) Kondisi Tempat Tinggal

Kondisi tempat tinggal merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi mikro yang mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, dan ketersediaan fasilitas umum seperti jalan dan transportasi (Basofi, 2017; Hartono et al., 2020) Kondisi tempat tinggal yang baik dapat meningkatkan kesehatan dan kenyamanan hidup individu, serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap berbagai sumber daya ekonomi. Biro Pusat Statistik (BPS) telah merilis indikator akses terhadap air minum bersih dan fasilitas sanitasi yang layak di Indonesia. Pada tahun 2015, BPS melaporkan bahwa 70,97% rumah tangga di Indonesia mempunyai akses terhadap air minum bersih, sementara 62,14% mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Namun, masih terdapat disparitas akses antarprovinsi, dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua rumah tangga mempunyai akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi di Indonesia.

### **2.1.2 Teori Pernikahan**

#### **2.1.2.1 Teori Pernikahan Becker**

Gary S. Becker (1974) merupakan seorang ekonom mengembangkan teori pernikahan yang dapat dianalisis dalam kerangka yang disediakan oleh ekonomi modern. Teori ini didasarkan pada dua prinsip dasar. Pertama, karena pernikahan hampir selalu dilakukan secara sukarela, baik oleh orang yang menikah atau orang

tua mereka, teori preferensi dapat diterapkan dengan mudah, dan orang yang menikah (atau orang tua mereka) diasumsikan berharap dapat meningkatkan tingkat utilitas mereka setelah menikah dibandingkan jika belum menikah. Kedua, karena banyak pria dan wanita bersaing dalam mencari pasangan hidup, diasumsikan bahwa terdapat pasar pernikahan. Setiap individu berusaha mencari pasangan terbaik, dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang ada.

Dalam teori pernikahan Becker, pernikahan dianggap sebagai suatu bentuk produksi rumah tangga, di mana komoditas yang dihasilkan meliputi makanan, kualitas dan kuantitas dini, prestise, rekreasi, kebersamaan, cinta, dan status kesehatan. Komoditas-komoditas ini tidak dapat dipasarkan atau ditransfer antar rumah tangga, meskipun dapat ditransfer antar anggota rumah tangga yang sama. Dalam teori ini, pernikahan dianggap sebagai suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh individu-individu yang berharap dapat meningkatkan tingkat utilitas mereka dibandingkan jika mereka belum menikah.

Determinan keuntungan dari pernikahan dalam teori ini yaitu keuntungan yang diperoleh dari pernikahan terkait dengan "kesesuaian" atau "komplementaritas" dari waktu, barang, dan input lain yang digunakan dalam produksi rumah tangga. Keberadaan dini dan cinta menunjukkan bahwa, bahkan dengan skala pengembalian yang konstan, seorang pria dan seorang wanita dapat memperoleh keuntungan dari pernikahan karena waktu dan keterampilan mereka tidak dapat saling menggantikan satu sama lain atau untuk barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan pasar atau rumah tangga. Kemudian, sorting dalam pernikahan dalam teori pernikahan Becker, diasumsikan bahwa terdapat pasar pernikahan. Setiap individu berusaha mencari pasangan terbaik, dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang ada. Dalam hal ini, sorting dalam

pernikahan terjadi berdasarkan karakteristik seperti pendidikan, kekayaan, dan lain sebagainya. Selain itu, pembagian output dalam pernikahan tidak ditentukan secara mekanis atau tetap, melainkan berubah seiring dengan perubahan penawaran dan permintaan dari berbagai jenis pasangan (Becker, 1974)

### 1.1.2.2 Teori Pernikahan Dini Wahhaj

Teori pernikahan dini yang dikembangkan oleh Wahhaj (2015) adalah sebuah model *overlapping generations* tentang pasar pernikahan yang menjelaskan bagaimana praktik pernikahan dini dapat dipertahankan dalam ketiadaan preferensi intrinsik untuk memilih menikah di usia dini. Dalam teori ini, diasumsikan bahwa terdapat atribut perempuan yang diinginkan dan relevan dengan keuntungan yang diperoleh dari pernikahan. Namun, hanya dapat diamati secara tidak pasti sebelum pernikahan dilangsungkan. Atribut tersebut merupakan formalisasi dari fenomena bahwa dalam masyarakat patriarki, "kehormatan" keluarga sangat terkait dengan "kemurnian" anggota perempuan keluarga, dan pengalaman atau asosiasi yang dimiliki oleh seorang gadis di luar rumah yang dapat menciptakan ketidakpastian mengenai "kemurniannya".

Dalam teori ini, atribut perempuan yang diinginkan ini hanya diamati secara tidak pasti sebelum pernikahan dilangsungkan, sehingga dalam kesetimbangan, prevalensi atribut tersebut menurun seiring waktu yang dihabiskan di pasar pernikahan dan oleh karena itu, usia dapat menjadi sinyal kualitas yang lebih buruk dan memerlukan biaya pernikahan yang lebih besar.

Menurut teori ini, wanita yang lebih tua memiliki kualitas yang lebih rendah di pasar pernikahan, sehingga mereka harus membayar lebih banyak saat menikah. Ini berarti bahwa semakin tua seorang wanita berada di pasar

pernikahan, semakin besar kemungkinan bahwa dia telah ditolak dalam pertunangan sebelumnya karena kualitasnya yang rendah.

Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa praktik pernikahan dini perempuan cenderung terjadi pada usia muda. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang kuat antara usia dan kualitas pengantin perempuan. Semakin banyak perempuan yang menerima tawaran pernikahan pada usia muda, semakin kuat hubungan negatif antara usia dan kualitas mereka. Hal ini mendorong generasi berikutnya untuk membuat pilihan yang serupa dalam menentukan usia pernikahan mereka. Akibatnya, praktik pernikahan dini perempuan terus berlanjut.

Namun, teori ini juga menunjukkan bahwa intervensi yang meningkatkan biaya kesempatan pernikahan dini dapat mengubah dinamika pasar pernikahan. Ketika lebih banyak remaja perempuan memilih untuk menunda pernikahan demi mencari peluang di luar pernikahan, hubungan antara usia dan kualitas pengantin perempuan menjadi kurang signifikan. Hal ini kemudian menyebabkan lebih banyak pria mencari perempuan yang lebih dewasa untuk dijadikan istri, sementara lebih banyak remaja perempuan menolak tawaran pernikahan pada usia yang lebih muda. Proses ini kemudian dapat memicu perubahan positif di mana praktik pernikahan dini perempuan dapat berkurang seiring dengan peningkatan penundaan pernikahan.

### **2.1.3 Status pernikahan**

Status pernikahan adalah usia di mana seseorang melakukan pernikahan untuk pertamanya kalinya (Utina dkk., 2018). Hal ini mengacu pada saat seseorang secara resmi menikah dan menjadi pasangan suami istri. Adapun, menurut Gobena & Berelie (2022) status pernikahan adalah usia ketika seorang wanita mulai tinggal bersama pasangan pertamanya setelah menikah. Pada

umumnya, status pernikahan dianggap penting karena dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan individu serta masyarakat secara keseluruhan (United Nations, 2015). Status pernikahan dapat bervariasi antara individu dan budaya, tetapi umumnya dianggap sebagai tonggak penting dalam kehidupan seseorang yang menandai transisi dari masa remaja ke dewasa (Utina dkk., 2018).

Status pernikahan memiliki dampak signifikan pada tingkat produktivitas pasangan usia subur, di mana peningkatan usia menikah dapat berkontribusi pada penurunan angka kelahiran (Utina dkk., 2018). Di Indonesia, pernikahan dianggap sebagai perilaku yang umum, dengan mayoritas penduduk melangsungkan pernikahan. Salah satu karakteristik pernikahan di Indonesia adalah seringkali terjadi pada usia yang masih muda, terutama di kalangan wanita di perdesaan atau pinggiran kota (Utina dkk., 2018). Seorang wanita menikah pada usia yang sangat muda dapat mengakibatkan perpanjangan masa reproduksi, yang mencakup usia subur sekitar 15 hingga 49 tahun (Utina dkk., 2018).

Sedangkan, Wanita yang menikah pada usia yang lebih tua, khususnya di pertengahan hingga mendekati usia 30 tahun atau lebih, cenderung memiliki jumlah dini yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia muda (Utina dkk., 2018). Selain itu, status pernikahan wanita dapat mempengaruhi risiko kesehatan selama kehamilan atau persalinan. Usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko terhadap keselamatan ibu dan dini, karena rahim wanita yang masih muda mungkin belum siap secara fisik untuk memproduksi dini atau belum memiliki kesiapan mental dalam menjalani kehidupan berkeluarga (Utina dkk., 2018). Sebaliknya, semakin tua usia pernikahan pertama, semakin tinggi risiko yang dihadapi dalam hal kehamilan atau persalinan (Utina dkk., 2018).

#### 2.1.4 Status Melahirkan

Status melahirkan merujuk pada waktu ketika seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan dini pertamanya (Talukder *et al.*, 2021). Melahirkan dianggap sebagai salah satu pengalaman paling signifikan dalam kehidupan seorang wanita karena dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti dampak fisik, psikologis, sosial, dan eksistensial pertamanya (Talukder *et al.*, 2021). Selain itu, kelahiran pertama juga merupakan momen penting karena secara otomatis mengubah status seorang perempuan menjadi ibu dan memiliki dampak signifikan pada rentang reproduksi, karena kesuburan secara langsung terkait dengan hal tersebut (Talukder *et al.*, 2021).

Status melahirkan dapat bervariasi dari rumah tangga ke rumah tangga dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, sosial, ekonomi, kesehatan, dan preferensi pribadi (Utina dkk., 2018). Hal ini kemudian dapat mempengaruhi jumlah dini yang akan dia memiliki selama hidupnya (Talukder *et al.*, 2021). Usia optimal untuk melahirkan adalah 20-35 tahun (Talukder *et al.*, 2021). Kehamilan pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua dapat memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi baik bagi ibu maupun bayi (WHO, 2023).

Pada usia yang terlalu muda, seperti di bawah 18 tahun, perempuan belum sepenuhnya matang fisik dan psikologis untuk menghadapi proses kehamilan dan melahirkan. Ini dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, seperti kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, dan masalah kesehatan lainnya. Di sisi lain, pada usia yang terlalu tua, seperti di atas 35 tahun, perempuan dapat menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti peningkatan risiko kelainan kromosom pada bayi, komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional dan tekanan darah tinggi, serta risiko persalinan dengan operasi Caesar (WHO, 2018).



### **2.1.5 Status Pendidikan Perempuan**

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan terstruktur untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka agar memiliki dimensi spiritual keagamaan, kendali diri, identitas pribadi, kecerdasan, moralitas yang baik, serta keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak atas pendidikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk melakukan diskriminasi atau mengabaikan pendidikan perempuan. Ini berarti bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk belajar dalam berbagai bidang. Pendidikan adalah sarana untuk menjadikan perempuan sebagai agen perubahan, bukan hanya sebagai penerima pasif dari program-program pemberdayaan. Selain itu, pendidikan juga dapat menjadi faktor penting dalam memberikan perempuan kemandirian ekonomi, baik melalui pekerjaan di luar rumah atau dalam peran domestic (Khayati, 2008).

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan dunia kerja (UNESCO, 2015). Pendidikan memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia (Fadhli & Fahimah, 2021). Tingkat pendidikan yang tinggi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Fadhli & Fahimah, 2021).

Adapun, menurut UNESCO (2015) pendidikan adalah proses formal atau informal yang melibatkan pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada individu melalui pengajaran, pelatihan, atau pengalaman. Adapun, pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang memiliki struktur hierarki dan tingkatannya disusun secara berurutan, mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk SD/MI atau yang setara, SMP/MTs atau yang setara, serta SMA/MA atau yang setara, dan juga Perguruan Tinggi (BPS, 2022).

### 1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan tahap pendidikan yang membentuk dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang setara, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang setara (BPS, 2022).

### 2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar. Jenjang pendidikan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah ini mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang setara (BPS, 2022).

### 3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah tahap pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup berbagai program seperti diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (BPS, 2022).

Sedangkan, pendidikan informal merujuk pada proses pembelajaran di luar kerangka pendidikan formal yang memiliki struktur dan tingkatan tertentu. Ini mencakup berbagai jenis pembelajaran, seperti kursus kecakapan hidup, pendidikan dini usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pelatihan pemberdayaan perempuan, pembelajaran literasi, pelatihan keterampilan dan kerja, program kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C), serta berbagai bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik (BPS, 2023).

#### **2.1.6 Status Pekerjaan**

Status pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bekerja dan tidak bekerja. Bekerja kemudian diklasifikasikan menjadi bekerja di sektor formal dan sektor informal (Wodon *et al.*, 2017). Pekerjaan di sektor formal mencakup pekerjaan yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan dan memiliki perlindungan sosial yang lebih baik. Pekerja formal biasanya memiliki kontrak kerja, hak-hak pekerja, dan akses ke program-program sosial seperti asuransi kesehatan dan pensiun. Contoh pekerjaan di sektor formal termasuk pekerja kantoran, pegawai negeri, dan pekerja di perusahaan swasta yang memiliki perjanjian kerja formal (Wodon *et al.*, 2017). Sementara itu, pekerjaan di sektor informal tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan dan seringkali tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Pekerja informal biasanya bekerja di sektor yang tidak terstruktur, seperti pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, atau pekerja di sektor pertanian kecil. Mereka seringkali tidak memiliki kontrak kerja formal dan tidak mendapatkan manfaat sosial seperti jaminan kesehatan atau pensiun (Wodon *et al.*, 2017).

Di sisi lain, menurut Badan Pusat Statistik tidak bekerja adalah kondisi di mana seseorang tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan pendapatan atau

gaji. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengangguran, tidak aktif mencari pekerjaan, atau tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Dampak dari tidak bekerja dapat beragam, termasuk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, ketergantungan pada orang lain, serta penurunan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tidak bekerja juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Ketika seseorang tidak bekerja, mereka dapat mengalami stres, kecemasan, dan rasa rendah diri karena merasa tidak produktif atau berguna bagi masyarakat. Selain itu, tidak bekerja juga dapat memengaruhi harga diri dan rasa percaya diri seseorang, terutama jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, tidak bekerja juga dapat mempengaruhi hubungan sosial seseorang.

### **2.1.7 Wilayah /Tempat Tinggal**

Wilayah atau tempat tinggal merujuk pada tempat di mana seseorang atau sekelompok orang tinggal atau menetap (Pribadi & Pauleit, 2015). Wilayah /tempat tinggal dapat mencakup berbagai jenis seperti perkotaan, perdesaan, perumahan, atau daerah tertentu dalam suatu wilayah (Pribadi & Pauleit, 2015). Adapun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mendefinisikan wilayah sebagai suatu area geografis atau tempat di mana kegiatan atau peristiwa terjadi, serta wilayah ini dapat diidentifikasi melalui berbagai cara, seperti koordinat geografis, sistem penomoran, atau alamat.

Dalam konteks penelitian, umumnya terdapat dua kategori wilayah yang digunakan untuk membagi wilayah, yaitu perkotaan dan (Pribadi & Pauleit, 2015). Perkotaan merujuk pada status wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai wilayah perkotaan (BPS, 2021). Sementara itu, perdesaan merujuk pada status wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan

yang belum memenuhi kriteria sebagai wilayah perkotaan (BPS, 2021). Pengelompokan ini dapat berguna dalam analisis data serta pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perbedaan karakteristik dan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan (Pribadi & Pauleit, 2015).

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Status Pernikahan dengan Kesejahteraan**

Studi empiris yang dilakukan oleh BPS dan UNICEF menemukan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Mereka juga memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan yang menika usia sangat muda dapat menjadi faktor yang memperburuk kesejahteraan perempuan (Statistik, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Parsons *et al.*, 2015) yang menemukan bahwa pernikahan usia dini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan menghambat kesejahteraan.

Wodon *et al.* (2018) menyatakan bahwa dini yang menikah dini dapat menghadapi tantangan finansial yang serius, karena pasangan yang menikah pada usia yang terlalu muda belum siap secara finansial untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan dan membesarkan dini. Di sisi lain, pernikahan pada usia yang lebih dewasa dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk menyelesaikan pendidikan, membangun karier, dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk pernikahan dan kehidupan keluarga (Statistik, 2020). Sedangkan, pernikahan pada usia yang lebih matang dapat mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Badan Pusat Statistik, 2016).

Namun, dilain sisi terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa perkawinan pada usia muda tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada situasi sosial, tetapi mempengaruhi kondisi finansial dari keluarga yang terlibat dalam perkawinan dini tersebut. Dampak ekonominya adalah bahwa kondisi ekonomi keluarga yang menikah pada usia muda tetap rendah dan mereka belum memiliki harta seperti rumah (Sari et al., 2015).

### **2.2.2 Hubungan Status melahirkan dengan Kesejahteraan**

Status melahirkan dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap kesejahteraan keluarga. Menurut Utina et al. (2018), status melahirkan dapat bervariasi antara rumah tangga. Masa dini dan remaja dianggap rentan terhadap risiko kehamilan, baik karena perkawinan usia dini maupun usia yang masih sangat muda (Sezgin & Punamäki, 2020). Ibu yang melahirkan pada usia yang lebih muda, khususnya dini dan remaja, cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, penghasilan yang lebih rendah, dan kesempatan kerja yang terbatas (Ningrum et al., 2021). Hal ini kemudian dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka (Ningrum et al., 2021).

Di sisi lain, perempuan yang melahirkan pada usia yang lebih tua cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih tinggi, dan kesempatan kerja yang lebih baik (Ningrum et al., 2021). Ibu yang melahirkan pada usia yang lebih tua juga memiliki kecenderungan untuk memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi (Widiantara & Yuhan, 2019). Pada usia yang lebih tua, perempuan umumnya telah mengembangkan keterampilan dan memiliki pengalaman kerja yang lebih mapan, sehingga mereka memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih stabil. Ini dapat memberikan dampak positif pada kondisi

ekonomi rumah tangga karena adanya sumber pendapatan yang lebih baik (UNFPA, 2013).

Namun, terlepas dari usia saat melahirkan, kesehatan ibu juga memainkan peran penting dalam kesejahteraan keluarga. Seperti yang ditunjukkan oleh Spence (2008), ketika seorang ibu menghadapi keterbatasan aktivitas kehidupan sehari-hari atau mengalami tingkat simptomatologi depresi yang tinggi, ini dapat mempengaruhi kemampuan ibu dalam merawat dini dan berkontribusi dalam keluarga. Kesehatan ibu yang buruk dapat mempengaruhi dinamika keluarga, termasuk peran ibu dalam memberikan perhatian, dukungan, dan pemenuhan kebutuhan dini dan pasangan.

### **2.2.3 Hubungan Status Pendidikan Perempuan dengan Kesejahteraan**

Pendidikan adalah faktor yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan Masyarakat (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan penghasilan, kesempatan kerja yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih tinggi (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Seseorang yang telah mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki akses yang lebih besar ke pekerjaan berkualitas dan berpenghasilan tinggi, yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi individu maupun keluarganya (Burchi, 2006). Dengan demikian, pentingnya pendidikan dan pengasuhan dini usia dini yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan manfaat kesejahteraan jangka Panjang (OECD, 2023).

Selain itu, pendidikan dapat berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dalam Masyarakat (World Bank, 2022). Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu terutama perempuan, pendidikan memberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan

mengurangi ketergantungan pada sektor pekerjaan yang kurang produktif atau berpendapatan rendah (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Hal ini kemudian akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meraih taraf hidup yang lebih baik dan mengatasi tantangan kemiskinan. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa wanita usia muda dengan pendidikan tertinggi kurang atau sama dengan SD cenderung melakukan perkawinan dini lebih sering dibandingkan dengan wanita usia muda yang berpendidikan SMP atau lebih tinggi. Wanita usia muda yang berstatus miskin juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan perkawinan dini (Mustika & Adib, 2021).

#### **2.2.4 Hubungan Status Pekerjaan terhadap Kesejahteraan**

Status pekerjaan memiliki hubungan dengan kesejahteraan. Jika perempuan menikah pada usia dini dan bekerja, mereka cenderung memiliki akses terhadap sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pekerjaan di sektor formal, misalnya, dapat memberikan upah yang lebih tinggi dan akses ke program-program sosial seperti jaminan kesehatan dan pensiun. Dengan memiliki pekerjaan yang stabil dan menguntungkan, perempuan yang menikah dini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung keluarga, dan merencanakan masa depan yang lebih baik (Raj *et al.*, 2019).

Di sisi lain, jika perempuan yang menikah pada usia dini tidak bekerja, dapat menghadapi tantangan kesejahteraan. Pernikahan dini dapat membatasi kesempatan perempuan untuk mengejar karir yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai kesejahteraan. Tanpa akses ke sumber pendapatan yang stabil, perempuan yang tidak bekerja mungkin lebih rentan



terhadap kesulitan ekonomi, termasuk kemiskinan. Selain itu, mereka mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal kebebasan ekonomi dan otonomi dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Purwaningsih, 2021).

Dengan demikian, status pekerjaan perempuan terutama yang menikah dini dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Faktor-faktor seperti tingkat upah, stabilitas pekerjaan, akses terhadap perlindungan sosial, dan keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga dapat berperan dalam menentukan tingkat kesejahteraan perempuan yang menikah pada usia dini (Raj *et al.*, 2019).

#### **2.2.5 Hubungan Wilayah/Tempat Tinggal Perdesaan dengan Kesejahteraan**

Wilayah/tempat tinggal dapat mempengaruhi kesejahteraan secara positif atau negatif tergantung pada berbagai faktor. Studi empiris menunjukkan bahwa wilayah /tempat tinggal yang baik, seperti di daerah perkotaan yang memiliki akses yang baik terhadap infrastruktur, layanan publik, dan lapangan kerja, dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat (R. P. Pradhan & Bagchi, 2015) Selain itu, masyarakat di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan dan peluang kerja yang lebih beragam, sementara masyarakat di wilayah perdesaan atau terpencil dapat menghadapi keterbatasan akses tersebut (Singh, 2011). Selain itu, wilayah tempat tinggal juga dapat mempengaruhi biaya hidup dan tingkat penghasilan masyarakat. Misalnya, di daerah perkotaan yang lebih maju, biaya hidup cenderung lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilan dan kesejahteraan masyarakat (Singh, 2011).

Menurut Pradhan dan Bagchi (2015) kondisi tempat tinggal yang baik, seperti hunian yang layak dan aksesibilitas yang baik, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi lokal. Selain itu, wilayah /tempat tinggal yang strategis juga dapat memberikan akses yang lebih mudah terhadap berbagai sumber daya ekonomi, seperti lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi.

Namun, di sisi lain, wilayah /tempat tinggal yang buruk, seperti di daerah perdesaan terpencil atau daerah dengan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi, dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan. Penelitian oleh Pramudita & Rudiarto (2022) menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perdesaan yang sulit mengakses fasilitas pendidikan dan lapangan kerja cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih rendah. Selain itu, perubahan penggunaan lahan dan pergeseran aktivitas ekonomi di wilayah peri-urban juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Singh, 2011).

### **2.3 Tinjauan Empiris**

Penelitian tentang dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kesejahteraan telah dilakukan oleh beberapa peneliti pada periode waktu yang berbeda.

Studi yang dilakukan oleh Marshan, et al. (2013) memiliki tujuan untuk menentukan prevalensi perkawinan dini dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2010. Penelitian ini menggunakan analisis kohort untuk memperoleh profil perkawinan dini di Indonesia. Melalui regresi logistik, penelitian ini menguji faktor-faktor determinan perkawinan dini pada perempuan berusia 20-24 tahun yang masih tinggal dengan keluarga asal

saat memiliki dini. Penelitian ini menemukan beberapa variabel yang memiliki pengaruh negatif dan positif terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini di Indonesia lebih dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan ekonomi, baik secara internal maupun eksternal terhadap perempuan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi perkawinan dini perlu fokus pada upaya menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengembangkan alternatif bagi perkawinan dini.

Parsons, *et al.*, (2015) membahas dampak pernikahan usia dini pada kondisi sosial-ekonomi. Studi ini menggunakan metode review literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak negatif pada kondisi ekonomi rumah tangga. Dini seseorang yang menikah dini cenderung memiliki peluang kerja yang lebih terbatas dan penghasilan yang lebih rendah, serta lebih mungkin mengalami kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi di masa depan. Pernikahan usia dini juga dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak negatif pada kesehatan dan keharmonisan rumah tangga. Studi ini juga menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan menghambat kemajuan kesejahteraan.

Sari, dkk., (2015) meneliti faktor-faktor pemicu perkawinan usia muda dan mengevaluasi dampaknya pada aspek sosial dan ekonomi di Desa Lebakwangi, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini menerapkan metode survei dengan mengambil seluruh populasi yang terdiri dari 37 individu pelaku perkawinan usia muda sebagai sampel penelitian. Data diperoleh melalui

kuesioner, dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabulasi frekuensi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan usia muda di Desa Lebakwangi meliputi aspek agama, adat atau tradisi, akses terhadap informasi, faktor ekonomi, dan tingkat pendidikan. Diantara faktor-faktor ini, faktor adat atau tradisi tampaknya memegang peranan utama dalam memicu perkawinan usia muda. Meskipun demikian, penelitian ini tidak menunjukkan dampak yang signifikan pada kondisi sosial pelaku perkawinan usia muda. Namun, terdapat dampak ekonomi negatif, yang tercermin dalam kondisi ekonomi yang tetap rendah dan kepemilikan aset yang terbatas, seperti ketiadaan rumah.

Petroni, *et al.*, (2017) membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Afrika Sub-Sahara. Studi ini menggunakan metode analisis data sekunder dari survei yang dilakukan di Kenya, Senegal, Uganda, dan Zambia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Afrika Sub-Sahara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan tradisi. Studi ini menemukan bahwa pernikahan dini seringkali terjadi karena rumah tangga miskin yang mengharapkan pernikahan dini mereka dapat membantu mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi, seperti adat yang mengharuskan seseorang menikah di usia muda. Studi ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga. Dini yang menikah dini cenderung gagal melanjutkan pendidikan mereka dan memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk risiko keguguran dan kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan menghambat kemajuan sosial dan ekonomi.

Akbar, dkk., (2018) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data Susenas 2016, dengan populasi penelitian adalah rumah tangga di Sumatera Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9.455 kepala keluarga. Sampel diambil dari 19 kabupaten/kota yang tersebar di Sumatera Barat, baik kota maupun desa. Penelitian ini menggunakan Model Logistik dan uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Wald dengan alpha 5%. Berdasarkan hasil penelitian, usia kawin pertama dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan keluarga. Sedangkan, Pekerjaan dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga di Sumatera Barat.

Efevbera *et al.*, (2019) meneliti tentang hubungan antara pernikahan dini seseorang, status sosial ekonomi, dan kondisi gizi buruk pada seseorang dewasa di 35 negara di Afrika Sub-Sahara. Studi ini menggunakan data dari 103 Survei Demografi dan Kesehatan (DHS) yang mewakili 35 negara di Afrika Sub-Sahara dari tahun 1991 hingga 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berhubungan dengan penurunan status sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan kesempatan kerja yang terbatas. Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dini seseorang memiliki hubungan yang kompleks dengan kondisi gizi buruk pada seseorang dewasa. Meskipun pernikahan dini seseorang berhubungan dengan peningkatan risiko kelahiran dini pada usia dini, rendahnya tingkat pendidikan, dan kesejahteraan, studi ini menemukan bahwa pernikahan dini juga berhubungan dengan penurunan risiko kondisi gizi buruk pada seseorang dewasa.

Sagalova (2021) meneliti tentang konsekuensi jangka panjang pernikahan dini dan kelahiran remaja di Afrika Barat dan Tengah. Sampel yang digunakan

dalam penelitian terdiri dari wanita berusia dewasa (berusia 20 tahun ke atas) dan pernah menikah minimal satu kali. Penelitian ini menggunakan kumpulan data cross-sectional yang dikumpulkan antara tahun 1986 dan 2017 di 21 negara Afrika Barat dan Tengah dalam program DHS dan MICS untuk memperkirakan hubungan pernikahan dan kehamilan pada masa remaja awal (10-14 tahun) dan akhir (15-19 tahun) secara retrospektif. pada akumulasi kekayaan, pencapaian pendidikan, serta kesuburan seumur hidup wanita. Studi ini menggunakan analisis regresi untuk menguji hubungan antara usia menikah pertama dan kehamilan dengan kuintil kekayaan, pencapaian pendidikan, dan jumlah total dini yang pernah dilahirkan. hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak buruk dari pernikahan dan kehamilan dini paling terasa dirasakan oleh dini perempuan yang berusia masih dibawah umur, baik secara langsung maupun jangka panjang.

Roy & Chouhan (2022) menganalisis faktor-faktor sosial-ekonomi yang terkait dengan pernikahan dini seseorang di distrik Malda, Benggala Barat, serta dampaknya terhadap hasil kehamilan. Studi ini didasarkan pada data primer yang dikumpulkan dari blok CD Manikchak dengan mengadopsi teknik survei sampel acak. Partisipan penelitian terdiri dari 357 wanita pernah kawin yang berusia 15–49 tahun. Hasil Analisis multivariat menunjukkan bahwa pernikahan dini seseorang secara substansial lebih tinggi pada seseorang yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggal di rumah tangga terpinggirkan. Orang tua yang berpendidikan lebih kecil kemungkinannya untuk menikahkan putri mereka pada usia dini. Selain itu, kemungkinan keguguran atau lahir mati, komplikasi selama kehamilan dan persalinan secara signifikan lebih tinggi di antara mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun dibandingkan mereka yang menikah pada usia 18 tahun atau lebih. Dengan demikian, pernikahan usia dini memiliki dampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga.

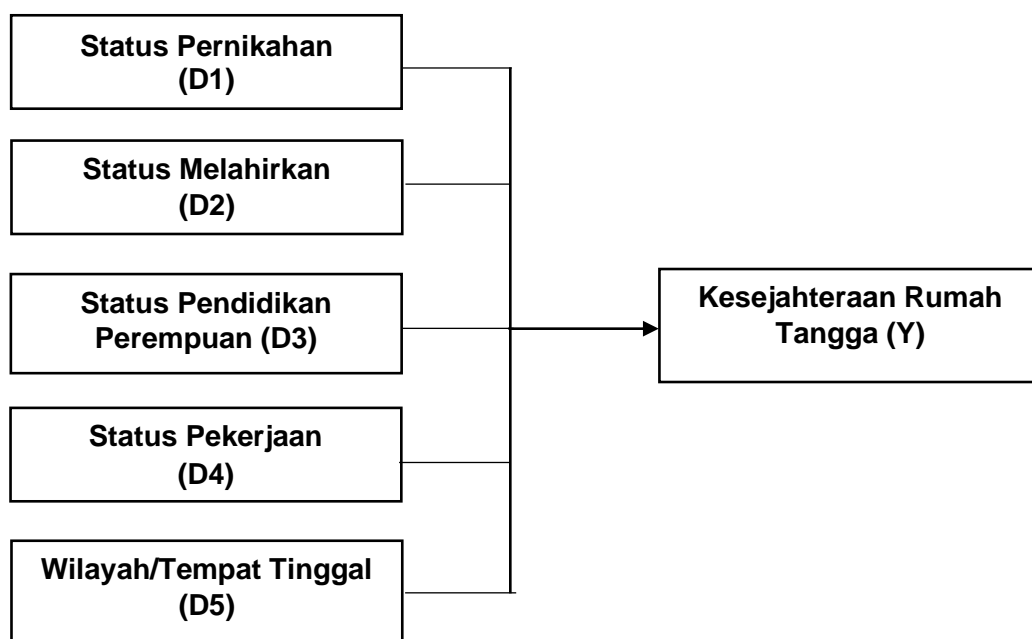
Rahayu & Wahyuni (2020) meneliti pengaruh pernikahan dini terhadap kemiskinan moneter di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia, 2014 (IFLS5), yang menyediakan data survei longitudinal komprehensif mengenai individu, rumah tangga, dan komunitas di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah wanita menikah berusia 15 tahun ke atas. Hasilnya menunjukkan prevalensi pernikahan dini di Indonesia mencapai 16,36 persen. Dari jumlah tersebut, 46,61 persen perempuan yang menikah pada usia remaja (sebelum 18 tahun) tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun yang diwajibkan, dan 52,35 persen perempuan yang menikah pada usia dini tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Namun hasil model biner probit menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan mengalami kemiskinan moneter. Artinya pernikahan dini tidak mempengaruhi pendapatan per kapita bulanan perempuan.

Cameron, *et al.*, (2022) bertujuan untuk memahami pengalaman pria dan wanita yang menikah sebelum usia dewasa guna mendorong perubahan sosial. Metode yang digunakan adalah estimasi efek tetap dengan memasukkan efek tetap geografis dan efek tetap saudara dalam analisis panel menggunakan data dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS). Penelitian ini melibatkan 40.800 partisipan selama dua dekade dan menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berkaitan dengan pencapaian pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah, dan keterbatasan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, baik bagi pria maupun wanita. Wanita yang menikah di usia dini memiliki risiko lebih tinggi dalam persalinan tanpa pengawasan medis, serta dini-dini mereka lebih mungkin mengalami kematian, pertumbuhan terhambat, dan penurunan performa pada tes

kognitif. Hal ini terutama terjadi ketika gadis-gadis muda menikah dengan pria yang juga masih di bawah umur.

## 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti diuraikan dengan kajian teori diatas. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat dampak pernikahan usia dini pada kondisi sosial-ekonomi. Dalam kerangka pemikiran ini, variabel independennya adalah Status pernikahan, Status pendidikan perempuan, jumlah anggota rumah tangga, usia saat menikah pertama, status pekerjaan, dan wilayah/tempat tinggal dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi variabel dependen yakni kesejahteraan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada kerangka pemikiran penelitian berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa terdapat perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status pernikahan.
2. Diduga bahwa terdapat perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status melahirkan.
3. Diduga bahwa terdapat perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status pendidikan perempuan.
4. Diduga bahwa terdapat perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan status pekerjaan.
5. Diduga bahwa terdapat perbedaan kesejateraan rumah tangga berdasarkan wilayah /tempat tinggal.